

>> Qayuum Amri

Kegiatan penelitian dan sosialisasi informasi menjadi strategi penting guna membangun citra positif minyak sawit di kawasan Eropa dan Amerika.

Menjawab Tuduhan Miring CPO

Pada September lalu, Malaysian Palm Oil Council (MPOC) dikejutkan dengan adanya ketentuan yang melarang pemuatan kembali iklan yang mengulas kelapa sawit berkelanjutan. Sebelumnya, memang lembaga ini telah menampilkan *advertisorial* di *Economist* – majalah terbitan Inggris – mulai edisi April sampai Mei. *Advertisorial* yang berjudul *Palm Oil: The Green Answer*, mengulas sisi positif komoditi kelapa sawit dari segi lingkungan dan ekonomis.

Pelarangan ini datang dari Advertising Standards Authority (ASA) – lembaga independen sebagai pengawas iklan – yang memiliki otoritas untuk mengatur periklanan di Inggris. Alasan ASA, *advertisorial* tersebut dapat menyesatkan pembaca majalah karena industri kelapa sawit Malaysia dinilai menyebabkan kerusakan lingkungan maupun sosial.

Ihwal pelarangan ini bermula dari keluhan Friends of the Earth (FOE) – LSM internasional lingkungan – kepada ASA terkait *advertisorial* tersebut. Menurut FOE, informasi yang menyebutkan klaim kelapa sawit itu ramah lingkungan dan berkelanjutan, haruslah berdasarkan bukti kuat. Oleh karena itu, FOE meminta ASA supaya iklan ini dilarang beredar di semua media karena dapat menyesatkan pembaca.

Menanggapi pelarangan ini, CEO MPOC, Tan Sri Dr. Yusof Basiron menyayangkan tindakan ASA yang kurang dapat bersikap netral dan objektif dalam masalah ini. "Sebenarnya, masyarakat mempunyai hak untuk memiliki dan membatasi informasi

yang mereka inginkan. Tetapi, ASA tampaknya lebih dipengaruhi kampanye negatif kelapa sawit sehingga kurang dapat menjadi 'wasit' yang baik," kata Basiron kepada *Foodnavigator*.

Semenjak dekade 1980-an, industri kelapa sawit dunia terutama Malaysia dan Indonesia menghadapi isu-isu seputar lingkungan dan sosial, yang dihembuskan oleh LSM internasional. Tercatat ada beberapa LSM internasional yang mengkritisi industri kelapa sawit antara lain Rainforest Action Network's (RAN), Greenpeace, Friends of the Earth, dan WWF.

Seperti RAN yang menuduh perkebunan kelapa sawit telah merusak ekosistem alam dengan membuka lahan di hutan-hutan tropis, padang rumput, dan lahan gambut. Selain itu, perkebunan kelapa sawit dinilai berkontribusi terhadap perubahan iklim sebagai akibat deforestasi. Salah satu cara yang dipakainya, RAN mendesak pihak pembeli minyak sawit seperti ADM, Bunge, dan Cargill untuk tidak membeli minyak sawit dan kedelai yang dituding bertanggungjawab atas kerusakan hutan. LSM yang berbasis di Amerika Serikat ini pun menempelkan stiker bertuliskan "Warning: Product May Contain Rainforest Destruction" di setiap produk yang mengandung minyak sawit.

Sementara itu Greenpeace pun giat mengkampanyekan moratorium (jeda tebang) sebagai upaya menangkal deforestasi yang terjadi, salah satunya melalui perluasan lahan kelapa sawit. Kampanye lainnya, LSM ini mengecam pembukaan lahan kelapa sawit di lahan

gambut, yang dinilai meningkatkan emisi karbon dunia. Dalam laporannya yang berjudul "Mengoreng Iklim", LSM ini mendesak perusahaan pengguna minyak sawit seperti Unilever, Nestle, P&G, yang dipandang turut berkontribusi terhadap kerusakan hutan dan lahan gambut di Indonesia, dengan membeli minyak sawit.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, Bustar Maitar, menuturkan kampanye Greenpeace lebih diarahkan kepada pencegahan deforestasi, yang terjadi lewat ekspansi perkebunan sawit ke areal hutan. "Oleh karena itu, kami mendesak industri kelapa sawit untuk tidak memakai hutan maupun areal gambut, sebagai pembukaan lahan baru. Sebagai solusinya, kan bisa industri sawit meningkatkan produktivitas tanpa harus membuka lahan baru," kata Bustar kepada *InfoSAWIT*.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Gapki, Purboyo Guritno mengatakan, tidak semua tuduhan LSM itu benar. Sebab, sudah banyak perusahaan kelapa sawit yang telah mengikuti izin dan mematuhi peraturan dengan tidak melakukan pembakaran hutan. "Apalagi perusahaan sawit juga telah mengikuti Amdal, dan kita terus berusaha mengikuti standar lingkungan pemerintah maupun RSPO," kata Purboyo.

Yusof Basiron menyatakan serangan NGO seperti Greenpeace dan FOE lebih bersifat politis dan perdagangan, ketimbang benar-benar melindungi lingkungan. "Mereka menyalahkan petani dan industri sawit di negara berkembang

atas terjadinya deforestasi, sebaliknya diam saja terhadap petani negara maju ketika terjadi kebakaran hutan," kata Yusof dalam rilisnya.

Terhadang Regulasi

Sebenarnya, hambatan pemasaran minyak sawit di kawasan Eropa dan Amerika, tidak saja berasal dari kampanye NGO, melainkan juga datang dari asosiasi komoditas tertentu. Tengok saja, bagaimana usaha *American Soybean Association* (ASA) yang berusaha menghadang masuknya CPO ke Amerika, dengan mengajukan rancangan undang-undang anti minyak tropis.

Tak hanya itu saja, ASA mengkampanyekan minyak sawit/minyak kelapa mengandung lemak jenuh (*saturated fats*), supaya konsumen tidak mengonsumsi produk makanan berbahaya CPO/CCO.

Food and Drug Administration (FDA), Lembaga Pengawas Obat dan Makanan, pernah menetapkan regulasi mengenai *labeling trans-fatty acid* yang dikaitkan dengan *saturated fats*. Peraturan ini menyangkut pencantuman *trans fat* yang dikaitkan dengan *saturated fats* pada label produk pangan.

Walhasil, peraturan ini sempat membuat produsen sawit nasional ketar-ketir karena dapat menurunkan volume impor minyak sawit Amerika. Baru-baru ini, Minnesota, negara bagian Amerika Serikat, menetapkan larangan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel, dengan alasan perkebunan sawit merusak hutan, mengganggu habitat orangutan dan membuat kebakaran hutan.

Di kawasan Eropa, produsen CPO juga dipusingkan dengan EU Directives on Renewable Energy and Fuel Quality (Ketentuan UE tentang Energi Terbarukan dan Kualitas Bahan Bakar) yang mengajukan kriteria supaya bahan baku biofuel dan *bioliquid* tidak berasal dari bahan baku yang mengandung *biodiversity* tinggi antara lain hutan primer, padang rumput, lahan gambut, dan rawa. Lewat kriteria ini, maka perdagangan minyak sawit ke Eropa dapat terancam karena sulitnya menerapkan permintaan tersebut.

Mendorong Promosi dan Penelitian

Sekretaris Umum Gapki, Joko Supriyono menuturkan, sejauh ini kampanye negatif terhadap minyak sawit tidak terlalu mempengaruhi permintaan CPO dari negara-negara Eropa. Walaupun demikian, pihaknya telah menyusun beberapa

strategi untuk menghadapi kampanye tersebut dan regulasi yang sifatnya menghambat.

Promosi bersama antara Indonesia dan Malaysia, menurut Joko, terus dilakukan dengan mempromosikan pelaksanaan budaya sawit berkelanjutan. "Terkait masalah regulasi, sebenarnya kalau itu sifatnya diskriminasi maka bisa saja dibawa ke WTO. Tapi itu kan tugasnya pemerintah. Cara lain, memperkuat penelitian sebagai upaya pembuktian ilmiah," ujar Joko.

Ketua Menteri Unit Penelitian Lahan Gambut Departemen Pertanian, Lullie Melling mengatakan, pemerintah Malaysia sangat gencar melakukan promosi positif ke berbagai negara Eropa. Sama dengan Indonesia, Malaysia pun sedang menyusun penelitian yang terkait emisi gas rumah kaca, sehingga dapat menunjukkan gambaran sesungguhnya kelapa sawit. "Intinya, kita tidak boleh dikontrol oleh negara lain karena kita pun punya hak

untuk mengatur negara kita sendiri," ujar Lullie kepada *InfoSAWIT* ketika berkunjung ke Jakarta pada September lalu.

FCP National Coordinator WWF Indonesia, Wiwin Effendy mengatakan, sebaiknya perkebunan sawit menerapkan praktek budaya berkelanjutan dengan lebih memperhatikan HCV dan mengimplementasikan *Better Management Practices* (BMP). "Sejauh ini, kami mengajak secara persuasif kepada perusahaan sawit, untuk mendorong proteksi *biodiversity* dan melakukan BMP," kata Wiwin.

Masalah lingkungan memang menjadi tantangan dunia di masa mendatang. Walaupun demikian, kelapa sawit tentunya tidak bisa disebut sebagai penjahat iklim, karena pelaku usahanya berupaya terus menerus menerapkan prinsip-prinsip budaya yang berkelanjutan. Lantaran, industri ini hidup dari alam yang berarti wajib menjaga kelestarian lingkungan demi kelangsungan usahanya. ■

10 Fakta Kelapa Sawit

Fakta	Keterangan
1. Kelapa sawit membantu pengurangan angka kemiskinan di negara berkembang	- Bisnis kelapa sawit di Indonesia menyerap 2,5 juta tenaga kerja, dan mengerakkan perekonomian wilayah terpencil. - Industri sawit Malaysia memperkerjakan 800 ribu orang di mana 405 ribu terlibat di dalam perkebunan. - 80% produksi minyak sawit berasal dari negara-negara berkembang, sehingga memiliki efek positif untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya.
2. Kepemilikan petani sangat besar di perkebunan kelapa sawit	- Di Indonesia, total luas lahan kelapa sawit milik petani mencapai 3,2 juta ha. - Di Malaysia, total lahan perkebunan sawit petani seluas 540 ribu ha.
3. Sebagai bahan baku biodiesel, minyak sawit memiliki rekam jejak emisi gas rumah kaca lebih rendah ketimbang komoditas lain	Dengan pendekatan analisis siklus hidup, emisi gas rumah kaca minyak sawit telah diperingkatkan setara karbon 835 kg. Kedelai emisi diperkirakan 1.387 kg dan rapeseed emisi sebesar 1.562 kg.
4. Perkebunan kelapa sawit memiliki kapasitas penyerapan karbon lebih tinggi	Perkebunan sawit memiliki waktu hidup 25-30 tahun. Ini berarti, kelapa sawit mampu kapasitas untuk menyerap karbon dioksida meniru hutan alam melalui daun abadi dan menutup kanopi.
5. Produktivitas kelapa sawit lebih tinggi dibandingkan komoditas minyak nabati lain. Selain itu, memiliki keunggulan dari segi efisiensi lahan	- Dari segi lahan, minyak sawit membutuhkan 0,26 ha untuk menghasilkan 1 ton CPO. Sementara, satu ton minyak kedelai memerlukan 2,22 ha. Minyak bunga matahari menghabiskan 2 ha untuk 1 ton. Dan, minyak kanola membutuhkan 1,52 ha. - Dari segi produktivitas, minyak sawit sebesar 3,5 ton/ha/tahun. Lalu, minyak kedelai 0,36 ton/ha/tahun. Minyak kanola sebesar 0,55 ton/ha/tahun, dan minyak bunga matahari mencapai 0,36 ton/ha/tahun.
6. Kelapa sawit tidak berkontribusi besar terhadap kerugian hutan hujan tropis	- Di Malaysia, total luas lahan kelapa sawit sebesar 20% dari lokasi tanah untuk pertanian dan perkebunan. Sementara itu, 60% wilayah Malaysia dicadangkan untuk kawasan hutan. Bandingkan dengan Eropa yang rata-rata luas hutan hanya 25 persen. - Di Indonesia, total luas perkebunan kelapa sawit mencapai 7,3 juta ha. Sedangkan, luas hutan konservasi 20,5 juta ha dan hutan lindung seluas 33,3 juta ha.
7. Pelaku perkebunan kelapa sawit mengikuti regulasi yang sifatnya domestik maupun internasional	- Pemerintah Indonesia dan Malaysia menerapkan aturan ketat dalam pembukaan dan budidaya lahan kelapa sawit. - Produsen kelapa sawit dunia bergabung RSPO yang membuat manajemen praktik minyak sawit berkelanjutan.
8. Minyak sawit memiliki fungsi strategis sebagai bahan baku makanan, kosmetik obat-obatan, dan energi	Hampir 50 negara di dunia menggunakan minyak sawit untuk memenuhi kebutuhan makan masyarakatnya. Lantaran, harganya yang murah dan bagus untuk kesehatan.
9. Kelapa sawit merupakan bahan baku energi terbaru	Minyak sawit dapat mengurangi ketergantungan kepada bahan bakar fosil.
10. Limbah kelapa sawit sangatlah multifungsi karena dapat didaur-ulang	Sebagai contoh, bungkil sawit bermanfaat sebagai pakan ternak. Limbah kayu sawit dapat dipakai menjadi bahan baku furnitur.

Sumber: World Growth, MPOC, Pusat Data InfoSAWIT